

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Administrasi Publik



OLEH

RISDA

NPM 2022045

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

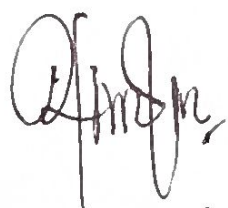
Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : RISDA
NPM : 2022045
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA TABALONG MATI
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

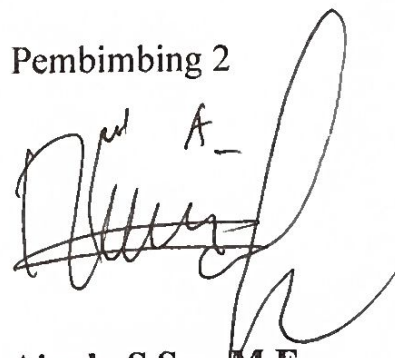
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



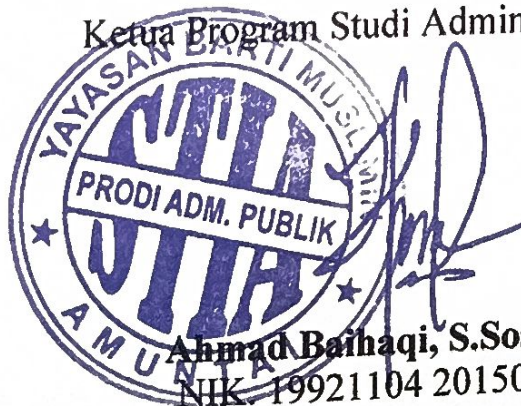
Ramona Handayani, S.Pd., M.A.
NUPTK. 8147760661300103

Pembimbing 2



Nor Ainah, S.Sos, M.E.
NUPTK. 3637774675230202

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan dalam menjalani proses penyusunan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, M.AP. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
3. Ibu Ramona Handayani, S.Pd., M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Nor Ainah, S.Sos, M.E. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan doa, dukungan, semangat, kasih sayang maupun materil kepada penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala keberkahan-Nya.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Efektivitas	10
2. Program Keluarga Harapan (PKH)	15
3. Kesejahteraan Masyarakat	21
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian	27

D. Data dan Sumber Data	27
E. Desain Operasional Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	33
H. Uji Kredibilitas Data.....	34

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Angka kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2025 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun masih tetap menjadi isu penting, yaitu dengan rasio kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03 persen dan di perkotaan 6,73 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat di wilayah rural masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding kawasan urban. Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan perlu terus ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi kompleks.

Data BPS juga menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan pada September 2024 mencapai 4,02 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 180,20 ribu orang. Walaupun terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, angka kemiskinan di Kalimantan Selatan tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Amuntai Utara yang secara umum masih memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.

Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat serta mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat, yang juga dikenal di dunia sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan dana PKH yang diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua KPM bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai lansia 60 tahun dan ibu hamil, menyusui, nifas terdapat anak yang berusia 0-6 tahun, anak SD, SMP, SMA atau sederajat dan anak yang berusia 6-21 tahun yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tujuan PKH dalam jangka pendek ialah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan pemerintah sebagai program yang mampu

memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, anak usia 0-6 tahun dan anak SD, SMP, SMA sederajat dan anak usia 6-21 yang belum menuntaskan wajib belajar, dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.

Secara ideal, pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan efektif, yaitu tepat sasaran, dimanfaatkan sesuai tujuan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas program ini belum sepenuhnya optimal

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapati permasalahan yang muncul pada salah satu kebijakan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada beberapa fenomena yang peneliti dapati saat observasi awal, yaitu:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masih adanya keluarga yang tergolong kurang mampu namun belum menerima bantuan PKH. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu namun masih terdaftar sebagai penerima. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat sekitar 2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara kondisi ekonomi

tergolong mampu namun masih menerima bantuan PKH. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan pembaruan data penerima belum berjalan secara optimal sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

2. Bantuan PKH belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan program. Bantuan PKH seharusnya digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Sesuai dengan kewajiban KPM PKH, bantuan tersebut digunakan untuk keperluan seperti pembelian perlengkapan sekolah (buku, seragam, alat tulis), pembayaran kebutuhan pendidikan anak, serta untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil, balita, dan anggota keluarga lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal, dari sejumlah data yang diperoleh terdapat sekitar 5 KPM yang menggunakan bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, sebagian masyarakat menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan lain seperti membeli kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, bahkan untuk keperluan di luar pendidikan dan kesehatan.
3. Kurangnya peran pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tabalong Mati, hal ini terlihat dari kurangnya pendampingan yang diberikan, pendamping hanya terlihat pada saat pendataan dan pemberian informasi ketika dana cair, namun kurang dalam pendampingan rutin seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang pada umumnya dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Padahal setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah

didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan KPM PKH agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TABALONG MATI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka peneliti menyesuaikan menggunakan teori dari Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memahami efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) serta melatih kemampuan berpikir ilmiah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan bantuan sosial secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan topik serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh:

1. Mulia Jaya dan Domri (2020). Judul penelitian **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin”**. Universitas Muara Bungo. Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Terdapat hambatan program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat, diantaranya adalah: rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH. Upaya Pemerintah Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat dalam mengatasi

hambatan pada program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya; meningkatkan sosialisasi, pemutakhiran data penerima PKH, kepastian jadwal pembayaran, penangguhan atau pembatalan peserta.

2. M. Husaini (2022). Judul penelitian **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Jurnal Ilmiah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tergolong cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti intensitas dan pemahaman, pengawasan dan pemantauan, ketepatan waktu dan sasaran, kesesuaian terhadap ketentuan, serta peran dan pengaruh program yang dinilai cukup baik. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya intensitas pertemuan antara pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program PKH. Dengan demikian, meskipun program PKH telah berjalan cukup efektif, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pendampingan, pengawasan, dan ketepatan sasaran agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian

Konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Mahmudi dalam (Muhammad Sawir, 2020:126) ‘Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Mardiasmo dalam (Joko, *et.al*, 2022:8) ‘Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Siahaan dan Pardede, 2022:91) ‘Efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya jika hasilkegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Handoko dalam (Ekasari, 2020:20) ‘Efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan dengan benar.

Menurut Hidayat dalam (Lisa Angrayni dan Yusliati, 2018:13) ‘Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan melalui kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang direncanakan. Efektivitas juga mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi mampu memberikan dampak atau hasil sesuai dengan tujuan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan atau kontribusi hasil terhadap sasaran yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

b. Pengukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda tergantung pada siapa yang menilai dan

juga menafsirkannya. Tingkatan efektivitas juga dapat diukur dengan cara membuat perbandingan yang telah ditentukan oleh hasil yang telah dicapai. Namun, apabila suatu usaha atau hasil yang telah dilakukan tidaklah tepat, maka tidak tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah diharapkan dan proses tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut S.P Siagian dalam (Takahepis, *et.al*, 2021:3-4), ukuran pencapaian suatu kegiatan dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Menurut Richard M. Streers dalam (Mudiana, 2024: 17-18)

Pengukuran efektivitas dapat dilihat berdasarkan:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu, pencapaian sasaran, akses dan dasar hukum.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran tahap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah di sepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. indikator integrasi terdiri dari, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator adaptasi terdiri dari, yaitu pelatihan, peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Menurut Campbell J.P dalam (Muhammad Sawir, 2020:127)

Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1) Keberhasilan Program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan suatu sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

3) Kepuasan Terhadap Program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini.

4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh

Richard M Steers dalam (Nesfi Ariyani, 2024:626) sebagai berikut:

- 1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi.
- 2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. aspek pertama adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik pekerja merupakan factor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas.
- 4) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.

Menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) untuk

mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan

menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian

Program Keluarga Harapan dalam (Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan, 2021:22) adalah ‘Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH’. Program ini merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

b. Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH dalam (Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan, 2021:22) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dalam (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021:22-23). Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/nifas/menyusui.

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b) Anak Usia Dini.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

1) Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

a) Bantuan sosial PKH

b) Pendampingan sosial PKH

c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

- a) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan. sesuai dengan protokol kesehatan.
- b) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
- c) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- f) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

e. Alur Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH dalam (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021:26-36) terdiri dari beberapa tahapan.

Berikut alur pelaksanaan PKH:

1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2) Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a) Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi
- b) Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

3) Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4) Penyaluran Bantuan Sosial

a) Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

b) Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima manfaat PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c) Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

- (2) Sosialisasi dan edukasi
- (3) Distribusi KKS kepada KPM
- (4) Proses penyaluran bantuan sosial KPM
- (5) Penarikan dana bantuan PKH
- (6) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- (8) Pemanfaatan bantuan sosial

5) Pemutakhiran Data

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

6) Verifikasi Komitmen

- a) Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan pemenuhan Kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksanaan PKH harus memastikan seluruh anggota KPM terdaftar, hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- c) Pelaksanaan entri data verifikasi komitmen dilakukan oleh pendamping setiap bulan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran seluruh anggota KPM pada setiap kunjungan ke layanan kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
- d) Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan, dan penghentian bantuan.

7) Pendampingan

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.

Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

8) Transformasi Kepesertaan

Kepesertaan penerimaan bantuan PKH selama enam tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi.

Pada kegiatan resertifikasi, KPM PKH kembali dilakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah KPM PKH memperoleh bantuan PKH selama kurun waktu tertentu. Pada tahun ke lima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH enam tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi. Hasil dari resertifikasi akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu graduasi atau transisi.

a) Transisi

Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi kewajiban KPM PKH serta dipersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.

b) Graduasi

Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi tiga syarat yaitu:

- (1) Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH
- (2) Tidak miskin tetapi masih memenuhi memiliki syarat PKH
- (3) Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen penting dalam pola pembangunan ekonomi, dan keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya.

Menurut Asmana dalam (Berry Sastrawan, *et.al*, 2024:473) ‘Kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kata “kesejahteraan” sendiri diambil dari kata dasar “sejahtera” yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sedangkan “masyarakat” mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan bersama.

Indeks kesejahteraan masyarakat merupakan alat ukur yang menilai tingkat keberhasilan suatu masyarakat, digunakan untuk menilai apakah suatu masyarakat mencapai keberhasilan atau tidak. Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, struktur demografi, tingkat lapangan kerja, tarif dan pola konsumsi, kondisi perumahan dan lingkungan, serta tingkat kemiskinan.

Sebagaimana diungkapkan dalam buku “Prospek Ekonomi Makro” dalam (Berry Sastrawan, *et.al*, 2024:476) ‘Terwujudnya masyarakat sejahtera dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, arah dan upaya pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan beberapa upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya kreatif warga dalam mengoptimalkan sumber daya alam.
- b. Penyusunan program untuk mewujudkan desa dengan masyarakat yang sadar kesehatan, asupan gizi, pola hidup sehat, dan kebersihan baik lahir maupun batin.
- c. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan tenteram.
- d. Memperkuat ketahanan budaya dan sosial masyarakat melalui landasan budaya lokal yang mempunyai nilai luhur. Upaya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai upaya tersebut, diperlukan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, digunakan indikator sebagai alat ukur yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau informasi. Indikator Barang Publik merupakan ukuran kinerja masyarakat yang menunjukkan apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak.

Menurut Lawrence Green dalam (Berry Sastrawan, *et.al*, 2024:477) Secara umum, beberapa hal dapat dijadikan indikator untuk menentukan kesejahteraan suatu masyarakat:

- a. Pendapatan Masyarakat. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kecemburuan sosial karena ada kesetaraan dalam masyarakat
- b. Pendidikan. Mendapatkan pendidikan dengan kesempatan yang cukup dan murah memudahkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang baik
- c. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang memadai dan jaminan kualitas kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mendapati permasalahan yang muncul pada salah satu kebijakan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada beberapa fenomena yang peneliti dapati saat observasi awal, antara lain penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya tepat sasaran, bantuan PKH belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan program, dan kurangnya peran pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tabalong Mati, hal ini terlihat dari kurangnya pendampingan yang diberikan, pendamping hanya terlihat pada saat pendataan dan pemberian informasi ketika dana cair, namun kurang dalam pendampingan rutin seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

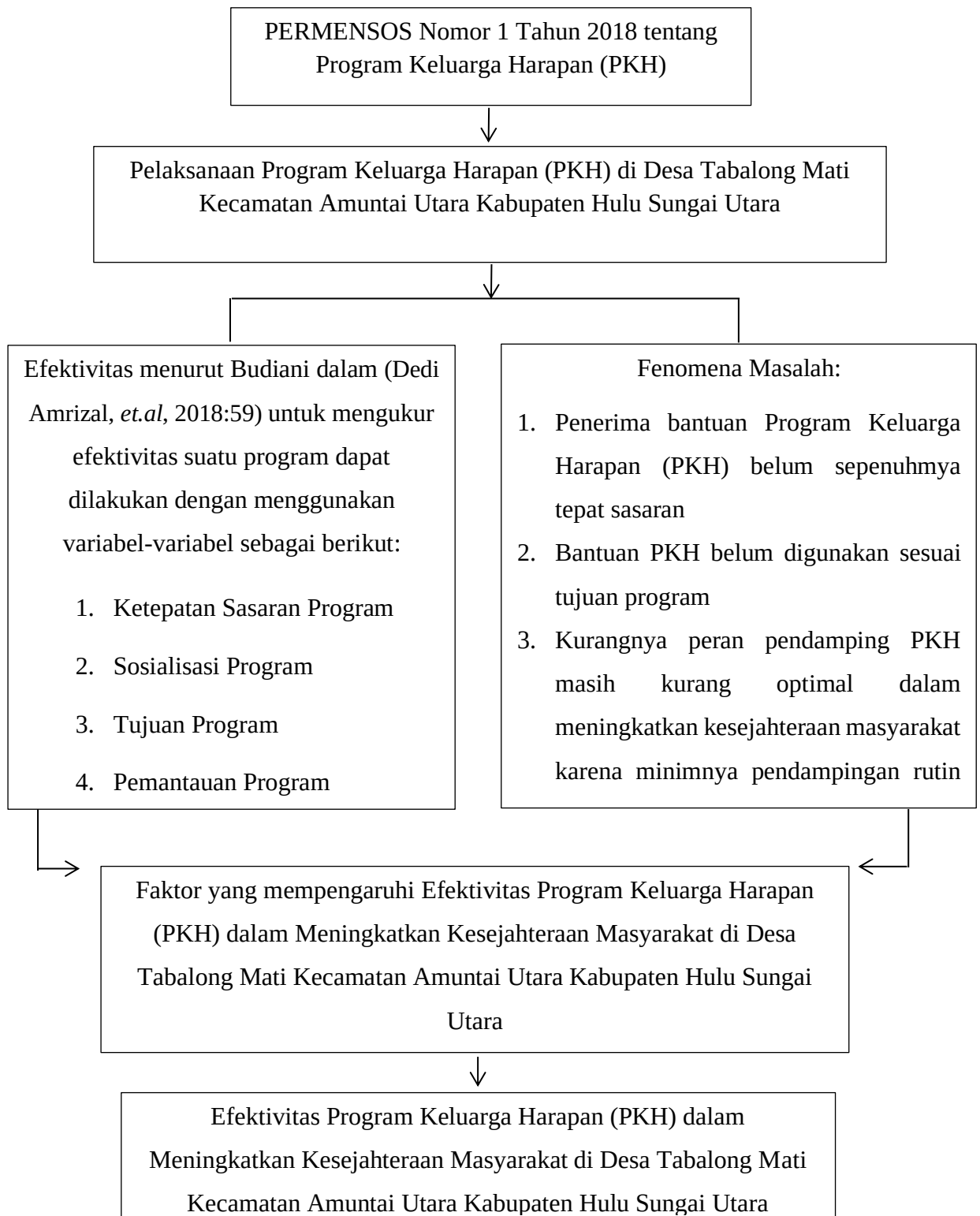
Mengingat pentingnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam penelitian ini memfokuskan pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut dari Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar kerangka pemikiran berikut ini.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71471.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif di mana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Juliansyah, 2017:33), ‘Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Menurut Creswell dalam (Juliansyah, 2017:34) ‘Pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Brewer dan Hunter dalam (Adhi dan Ahmad, 2019:4) ‘Penelitian kualitatif secara inheren merupakan fokus perhatian dengan beragam metode-metode. Menurut Moleong dalam (Adhi dan Ahmad, 2019:6)

‘Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Jadi dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono dalam (I Made Sudarma, *et.al.* 2021:45) ‘Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan objektif.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam (Syafnidawaty 2020) ‘Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Husein Umar dalam Syafnidawaty (2020) ‘Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.

Jadi data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan dengan para informan yang berkompeten. Data primer dapat disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Nuning Indah Pratiwi (2017:212) ‘Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder diperoleh dari informasi tertulis, dokumentasi, berita online, buku, skripsi, jurnal, artikel, dan informasi online yang peneliti himpun yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2019:133) “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Purposive sampling adalah teknik penarikan data yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi atau keseluruhan dari sumber data yang ada dengan pertimbangan yang didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial HSU	1 Orang
2	Koordinator PKH Kabupaten HSU	1 Orang
3	Kepala Desa	1 Orang
4	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1 Orang
5	Pendamping PKH	1 Orang
6	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH	6 Orang
7	Masyarakat Non Penerima PKH	3 Orang
Jumlah		14 Orang

(Sumber: Data dibuat oleh penulis, 2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah.

Penelitian ini yang berjudul Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan teori Menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et.al*, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal, <i>et.al</i> , 2018:59)	1. Ketepatan Sasaran Program	a. Kriteria sasaran b. Ketepatan peserta program
	2. Sosialisasi Program	a. Kemampuan pelaksanaan sosialisasi b. Kejelasan informasi pelaksanaan program

	3. Tujuan Program	a. Tujuan Program b. Hasil pelaksanaan program c. Pencapaian tujuan program
	4. Pemantauan Program	a. Pemantauan program b. Evaluasi program c. Tindak lanjut terhadap program

(Sumber: Data dibuat oleh penulis, 2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat.

Menurut Sugiyono (2019:296) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Secara sederhana observasi diartikan sebagai cara melihat, memperhatikan, dan mencatat sesuatu yang ada di sekitar.

Menurut Riyanto dalam (Hardani, *et.al*, 2020:125) ‘Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebelumnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksananannya dapat berlangsung di dalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka dengan tujuan tertentu.

Menurut Nazir dalam (Hardani, *et.al*, 2020:138) ‘Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, kutipan, buku dan bahan referensi lain yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Hardani, *et.al* (2020:149) “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.”

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bongdan dalam (Hardani, *et.al*, 2020:161) *‘Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani, *et.al*, 2020:163-189) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2023:365-372) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi diartikan adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Berbagai sumber

yang dapat digunakan untuk memperjelas data-data suatu penelitian baik sumber manusianya maupun sumber berupa buku-buku rujukan.

6. Mengadakan *Member check*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah suatu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D. *et.al.* (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Anggrayni, L., & Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Anonim. (2018). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Ariyani, N. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 626.
- Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun*. Retrieved March 17, 2026, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025, January 15). *Profil Kemiskinan Kalimantan Selatan, September 2024*. Retrieved March 17, 2026, from Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan: <https://kalsel.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/1989/kalimantan-selatan-poverty-profile--september-2024>
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Hardani, *et.al.* (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hertati, D, *et.al.* (2020). *Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Teori Kajian Empiris*. Surabaya: Mitra Abisatya.
- Husaini, M. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15828-15835
- Jaya, M., & Domri. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabit Barat Kabupaten Merangin. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 39-53.

- Joko, E. A. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Juliansyah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: KENCANA.
- Kemensos RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Jakarta
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mudiana, et. al. (2024). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos)*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Sastrawan et, a. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473-479.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yograkarta: Deepublish.
- Siahaan, P. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Purwokerto: Pena Persada Kerta Utama.
- Siregar, L. &. (2023). *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*. Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari.
- Sitta. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 5.
- Sudarma, M., et.al. (2021). *Metodologi Kesehatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafnidawaty. (2020, November 8). *DATA PRIMER*. Retrieved February 16, 2026, from Universitas Raharja: <https://raharja.ac.id/data-primer/>
- Takahepis, K. M. (2021). Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1, 3-4.
- Tim Penyusun. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Zohriah, A. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kepustkaan*. Indramayu: Cv. Adanu Abimata.